
**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP TERHADAP KEANDALAN
LAPORAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Ita Kumaratih¹
Thessa Putri Anzani Indra²**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun
Jl. Soekarno Hatta No.448 Bandung

Email : ita.kumaratih@inaba.ac.id

Email : thessa.putri@gmail.com

ABSTRAK

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menjadi kemudahan bagi setiap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Aset tetap merupakan komponen utama yang nilainya sangat material di dalam laporan keuangan daerah. Nilai aset tetap yang material maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern atas aset tetap untuk mencegah berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap aset tetap dan untuk menghasilkan informasi atas aset tetap yang andal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Data yang digunakan adalah data primer, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 48 responden. Pengambilan sampel menggunakan *Simple Random Sampling*. Untuk mengukur besarnya pengaruh kedua variabel digunakan Analisis koefisien

korelasi spearman rank dan koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan peroleh rata-rata persentase 85% termasuk kedalam kategori sangat baik. (2) Keandalan laporan Aset Tetap telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan peroleh rata-rata persentase 86,88%, termasuk ke dalam kategori sangat baik. (3) Korelasi antara kedua variabel sebesar 0,590 artinya Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap dan Keandalan Laporan Aset Tetap memiliki hubungan yang cukup kuat dan hasil perhitungan analisis koefisien determinasi (KP) menunjukkan bahwa keandalan laporan aset tetap tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan dari sistem pengendalian intern aset tetap sebesar 34,8% dan sisanya yaitu 65,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap dan Keandalan Laporan Aset Tetap

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan sebuah bentuk tatanan organisasi yang mencakup segala bidang yang berhubungan dengan masyarakat. Reformasi birokrasi di Indonesia di wujudkan dalam bentuk otonomi daerah melalui pembentukan Undang–Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang– Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia yaitu terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralisasi ke arah paradigma desentralisasi. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengefesiesikan pemanfaatan potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menjadi kemudahan bagi setiap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Akan tetapi dengan kewenangan tersebut, masih banyak terjadi permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta aset terutama aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Atas dasar hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan diberlakukan dan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di setiap pemerintahan, diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan atau masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

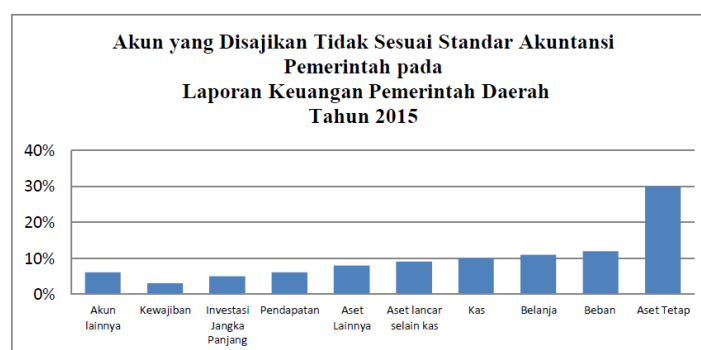
Untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melakukan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Pemekaran Wilayah. Pemekaran wilayah dilakukan karena luasnya wilayah cakupan sehingga potensi daerah kurang terkelola dengan baik. Dari hasil pemekaraan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu memberikan

pelayan optimal kepada masyarakat serta dapat mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah (aset) yang telah memunculkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang tertib.

Aset tetap merupakan komponen utama yang nilainya sangat material di dalam laporan keuangan daerah, hal tersebut mengindikasikan bahwa aset tetap adalah faktor yang menunjang kelangsungan hidup suatu entitas baik dalam sektor pemerintah ataupun swasta dalam kegiatan operasionalnya. Nilai aset tetap yang material maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern atas aset tetap untuk mencegah berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan serta pengendalian terhadap aset tetap dan untuk menghasilkan informasi atas aset tetap yang andal.

Salah satu bentuk sistem pengendalian intern atas aset tetap adalah setiap perolehan, penghapusan atau penghentian suatu aset tetap harus sesuai prosedur dan disertai bukti yang lengkap. Prosedur yang tidak benar atau tidak disertai bukti yang lengkap akan mempengaruhi keandalan dari laporan aset tetap dan akan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fenomena yang berlaku saat ini adalah permasalahan aset tetap pemerintah daerah yang menjadi perhatian didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016 semester 1.



Gambar 1

Akun yang Disajikan Tidak Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016 semester1

Berdasarkan grafik diatas bahwa akun yang disajikan tidak sesuai SAP adalah akun Aset Tetap sebesar 30%. Secara umum permasalahan aset tetap yang ditemukan pada pemerintah daerah, meliputi :

1. Pencatatan aset tetap belum didukung dengan daftar aset maupun pencatatan dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yang valid dan informatif
2. Aset tetap tanah untuk gedung dan bangunan, jalan dan saluran irigasi serta aset yang bersumber dari dana bos belum dicatat
3. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung oleh bukti kepemilikan

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (IHPS:97), menyatakan :

“Permasalahan aset tetap pada pemerintah daerah disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, pada umumnya terjadi karena pejabat atau pegawai yang bertanggungjawab lalai dan tidak memahami ketentuan yang berlaku dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan”.

Salah satu pemerintah daerah yang mengalami permasalahan aset tetap dan lemahnya sistem pengendalian intern aset tetap adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten hasil pemekaran wilayah dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Soreang. Kabupaten Bandung Barat merupakan pemerintah daerah yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini dibuktikan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterimanya selama tahun 2011 – 2015 atas laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Permasalahan aset tetap pemerintah Kabupaten Bandung Barat diantaranya yaitu :

1. Aset tetap milik Kabupaten Bandung Barat berupa kendaraan hasil pelimpahan dari Kabupaten Induk, Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki kelengkapan bukti kepemilikan
2. Kurangnya pengamanan fisik atas aset tetap

3. Jumlah dan nilai aset tetap yang tercatat didalam laporan keuangan tidak diketahui keberadaannya fisiknya.

(Sumber: <http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/06/10/masalah-aset-kabupaten-bandung-barat-sulit-raih-wtp/>)

Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan pemeriksaan yang memadai untuk meyakini saldo aset tetap tersebut sehingga berdampak pada opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Pemerintah Daerah harus menyadari perlunya manajemen yang baik dengan menerapkan sistem pengendalian intern atas aset tetap yang memadai agar terciptanya pengelolaan yang efektif dalam seluruh bidang kegiatan pemerintahan terutama dalam mengelola keuangan dan aset tetap pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Sistem Pengendalian Intern

Secara umum sistem pengendalian intern merupakan sebuah metode yang berisi kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi. Dilaksanakannya sistem pengendalian intern oleh organisasi yaitu untuk mencegah terjadinya berbagai macam penyalahgunaan. Menurut Mulyadi (2016:129) "Sistem Pengendalian Intern adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 1 (1), menyatakan bahwa :

"Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:203) bahwa :

“Sistem Pengendalian Intern merupakan sarana bagi manajemen yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran–ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dituangkan dalam suatu kebijakan, dan atau prosedur sebagai suatu alat untuk menjamin tercapainya tujuan suatu entitas melalui terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif dan efisien serta tersajinya laporan keuangan yang yang andal.

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap penyajian laporan posisi keuangan pemerintah daerah. Menurut Indra Bastian (2006:69) menyatakan bahwa :

“Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 bahwa “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 7) bahwa “Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Berdasarkan pengertian aset tetap diatas, dapat disimpulkan Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dengan cara dibeli, siap digunakan atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap

Sistem pengendalian intern diterapkan didalam lingkungan pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan entitas pemerintah dapat tercapai. Suatu entitas baik pemerintah ataupun swasta, sangat perlu untuk menerapkan sistem pengendalian intern terutama dalam aset tetap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 1 (1), menyatakan bahwa :

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Indra Bastian (2006:69) menyatakan bahwa

“Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Berdasarkan pengertian Sistem Pengendalian Intern dan Aset Tetap diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap adalah suatu metode yang digunakan oleh manajemen dalam mengamankan aset tetap serta memeriksa kecermatan dan kebenaran data akuntansi atas aset tetap. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern aset tetap, diharapkan dapat menghasilkan informasi aset tetap yang andal.

Keandalan Laporan Aset Tetap

Keandalan merupakan bagian dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 bahwa :

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki”.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- “1. elean
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami.”

Sedangkan menurut Nelson Lam (2014:24) menyatakan bahwa “Untuk memenuhi tujuan penyediaan informasi yang berorientasi pada pengguna, laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang memadai. Kerangka konseptual menetapkan dua karakteristik kualitatif fundamental yaitu :

1. Relevansi
2. Penyajian Jujur (Andal).”

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan karakteristik kualitatif adalah suatu kualitas laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan memiliki informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan jika laporan keuangan yang disajikan memenuhi karakteristik kualitatif tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan alasan yang mendasari penggunaan metode tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif verifikatif. Metode penelitian yang relevan perlu ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Sugiyono (2016:1) menyatakan bahwa “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data mengenai tujuan dan kegunaan tertentu yang di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis”.

Menurut Moh. Nazir (2013:54) menerangkan bahwa :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Metode deskriptif digunakan untuk menjawab identifikasi masalah pertama dan kedua, yaitu bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan bagaimana Keandalan Laporan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Moh. Nazir (2013:54), menyatakan “Metode penelitian verifikatif adalah metode penelitian menguji kebenaran, dengan kata lain metode verifikatif merupakan metode untuk proses pengujian hipotesis”. Metode verifikatif digunakan untuk menjawab identifikasi masalah yang ketiga, yaitu berapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Deskriptif

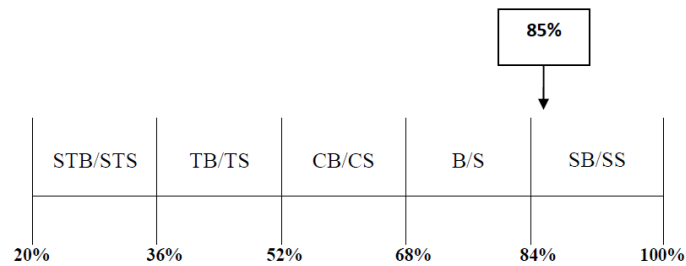
Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap

Pada penelitian ini Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intren Aset Tetap diukur menggunakan 5 indikator yang dioperasionalkan menjadi 22 pernyataan. Berikut ini adalah tanggapan mengenai indikator-indikator Sistem Pengendalian Intren Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

a. Skor Ideal = $n \times 5 = 48 \times 5 = 240$

b. Persentase = $(\text{Skor total/skor ideal}) \times 100\%$

Skor terendah terdapat pada pernyataan kuesioner nomor 11 dan 14 mengenai Rekapitulasi buku induk inventarisasi diotorisasi oleh pengelola (Sekretaris Daerah) dan Setiap SKPD melakukan pencatatan atas aset tetap yang dimilikinya kedalam kartu aset tetap dengan persentase sebesar 78,75%. Rata-rata Persentase tanggapan responden mengenai Variabel Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap sebesar 85%. Rata-rata persentase tersebut kemudian dipetakan ke dalam garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 2
Garis Kontinum Kategori Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap

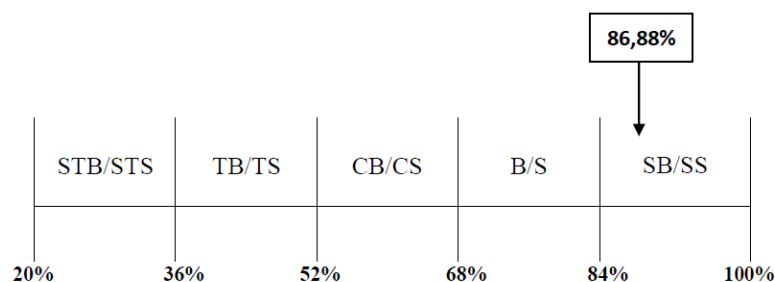
Berdasarkan garis kontinum, dapat dilihat bahwa tingkat Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap berada pada kategori SB/SS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap sudah diterapkan dengan sangat baik.

Keandalan Laporan Aset Tetap

Pada penelitian ini Keandalan Laporan Aset Tetap diukur menggunakan 3 indikator yang dioperasionalkan menjadi 6 pernyataan. Berikut ini adalah tanggapan mengenai indikator-indikator Keandalan Laporan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

- a. Skor Ideal = $n \times 5 = 48 \times 5 = 240$
- b. Persentase = $(\text{Skor total} / \text{skor ideal}) \times 100\%$

Skor terendah terdapat pada pernyataan kuesioner nomor 3 mengenai informasi dan data mengenai aset tetap yang disajikan dalam laporan aset tetap sesuai dengan keberadaan fisik aset tetap tersebut sebesar 83,75 %. Rata-rata Persentase tanggapan responden mengenai Variabel Penilaian Keandalan Laporan Aset Tetap sebesar 86,88%. Rata-rata persentase tersebut kemudian dipetakan ke dalam garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 3
Garis Kontinum Kategori Keandalan Laporan Aset Tetap

Berdasarkan garis kontinum, dapat dilihat bahwa Keandalan Laporan Aset Tetap berada pada kategori Sangat Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Aset Tetap dapat diandalkan.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern aset tetap terhadap keandalan laporan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil dari perhitungan didapat dengan menggunakan program SPSS versi 22 (*Statistic Program for Social Science*). Adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,748	3,148		,238	,813
SISTEM PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP	,265	,034	,757	7,848	,000

a. Dependent Variable: KEANDALAN LAPORAN ASET TETAP

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS Versi 20

1. Konstanta (α) sebesar 0,748, jika Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap (X) bernilai 0 maka Keandalan Laporan Aset Tetap adalah sebesar 0,74%.
2. Koefisien regresi (b) sebesar 0,265, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan tingkat Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap sebesar 1% maka Keandalan Laporan Aset Tetap meningkat 0,265%.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (KP) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai R-Square. Koefisien determinasi digunakan untuk menjawab identifikasi masalah ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem

pengendalian intern aset tetap terhadap keandalan laporan aset tetap. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 2
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.590a	.348	.334	11,42594	.348	24,562	1	46	.000

a. Predictors: (Constant), RX

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS Versi 20

Untuk memastikan hasil perhitungan SPSS, maka dilakukan perhitungan manual, Koefisien Determinasi dihitung dengan rumus :

$$KP = 0,5902 \times 100\%$$

$$= 0,348 \times 100\%$$

$$KP = 34,8\%$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh sistem pengendalian intern aset tetap terhadap keandalan laporan aset tetap adalah sebesar 34,8%, dan sisanya 65,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis

Uji T

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk mencari thitung. Jenis hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif (pengaruh) dengan populasi atau sampel yang digunakan sebanyak 48 responden, sehingga koefisien korelasi *Rank Spearman* langsung dibandingkan dengan nilai kritis dari ttabel derajat kesalahan 5% ($\alpha = 0.05$). Pengujian hipotesis dengan uji t ini digunakan untuk pengujian signifikansi korelasi dimana dua atau lebih variabel independen berhubungan secara parsial (tidak bersamaan). Kriteria untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak terdapat pengaruh yang signifikan)

2. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (terdapat pengaruh yang signifikan)

Dalam melakukan pengujian nilai t diatas, pengolahan data penelitian melalui kuesioner menggunakan bantuan program SPSS Version 20, adapun hasil pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,045	3,351		2,998	,004
SISTEM PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP_X	,590	,119	,590	4,956	,000

a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Aset Tetap_Y

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS Versi 20

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui t -hitung sebesar 4,955 dengan nilai t -tabel sebesar 1,6786 artinya t -hitung lebih besar dari t -tabel ($4,955 > 1,6786$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap (X) terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap

Dari hasil uji regresi diperoleh hasil yang mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap dengan nilai determinasi sebesar 0,348 atau (34,8%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap (X) terhadap variabel dependen Keandalan Laporan Aset Tetap (Y)

sebesar 34,8%, sedangkan sisanya sebesar 65,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, diantaranya perubahan regulasi pemerintah secara global, kemampuan sumber daya manusia dalam memahami perubahan teknologi yang menunjang terhadap kegiatan operasional dan budaya organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis untuk sistem pengendalian intern aset tetap mempunyai pengaruh terhadap keandalan laporan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun hal-hal yang mendasari adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif secara keseluruhan pada variabel X (Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap), menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat termasuk kedalam kategori Sangat Baik dengan rata-rata persentase penilaian 85%. Artinya sistem pengendalian intern aset tetap secara umum telah diterapkan dengan sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan, kelemahan yang ditemukan dalam penerapan sistem pengendalian intern aset tetap adalah adanya beberapa rekapitulasi buku induk inventarisasi yang belum diotorisasi oleh pengelola (Sekretaris Daerah) dan setiap SKPD belum melakukan pencatatan yang baik atas aset tetap yang dimilikinya kedalam kartu aset tetap dengan persentase sebesar 78,75%.
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif secara keseluruhan pada variabel Y (Keandalan Laporan Aset Tetap), menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori Sangat Baik dengan rata-rata persentase sebesar 86,88%. Artinya laporan atas aset tetap pemerintah daerah dapat diandalkan dan telah sesuai dengan unsur-unsur keandalan. Meskipun laporan aset tetap dapat diandalkan, tetapi masih terdapat kelemahan atau hambatan yang mempengaruhi keandalan dari laporan aset tetap yaitu informasi dan data mengenai beberapa aset tetap milik pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang disajikan dalam laporan aset tetap tidak sesuai dengan keberadaan fisiknya sebesar 83,75%, aset tetap tersebut berupa kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasional.

3. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai sebesar 0,590 sehingga dapat dikatakan bahwa korelasi antara Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap pada Kabupaten Bandung Barat memiliki hubungan yang cukup kuat, sedangkan hubungannya adalah positif yang ditunjukkan oleh persamaan $Y = 0,748 + 0,265x$. Hasil perhitungan analisis koefisien determinasi (KP) Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap menunjukkan kontribusi sebesar 34,8% dan sisanya sebesar 65,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai thitung > t tabel yaitu sebesar $4,955 > 1,6786$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan yaitu “Adanya Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap pada Kabupaten Bandung Barat” dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Indra, Bastian. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik..* Jakarta : Salemba Empat.
- Moch, Nazir. 2013. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi.2016. *Sistem Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007. *Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah.* Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah.* Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.
- <http://www.bpk.go.id/ihaps>
- <http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/06/10/masalah-aset-kabupaten-bandung-barat-sulit-raih-wtp/>

Riwayat Hidup :

Ita Kumaratih, S.E., Ak., M.Si., CA. Sekarang menjadi Dosen Tetap di STIE INABA.

Thessa Putri Anzani Indra, S.E. Alumni STIE INABA.